**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DITINJAU DARI PENEGAKAN HUKUMNYA**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Mengajukan Skripsi dalam Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**GILANG RAMADHAN**

**NPM 5119500251**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2023**

# PENGESAHAN

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DITINJAU DARI PENEGAKAN HUKUMNYA**

**Disusun Oleh:**

**Gilang Ramadhan**

**NPM 5119500251**

Telah diuji dan dipertahankan dihadap SIDANG SKRIPSI

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal:

Hari :

Tanggal :

# 

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

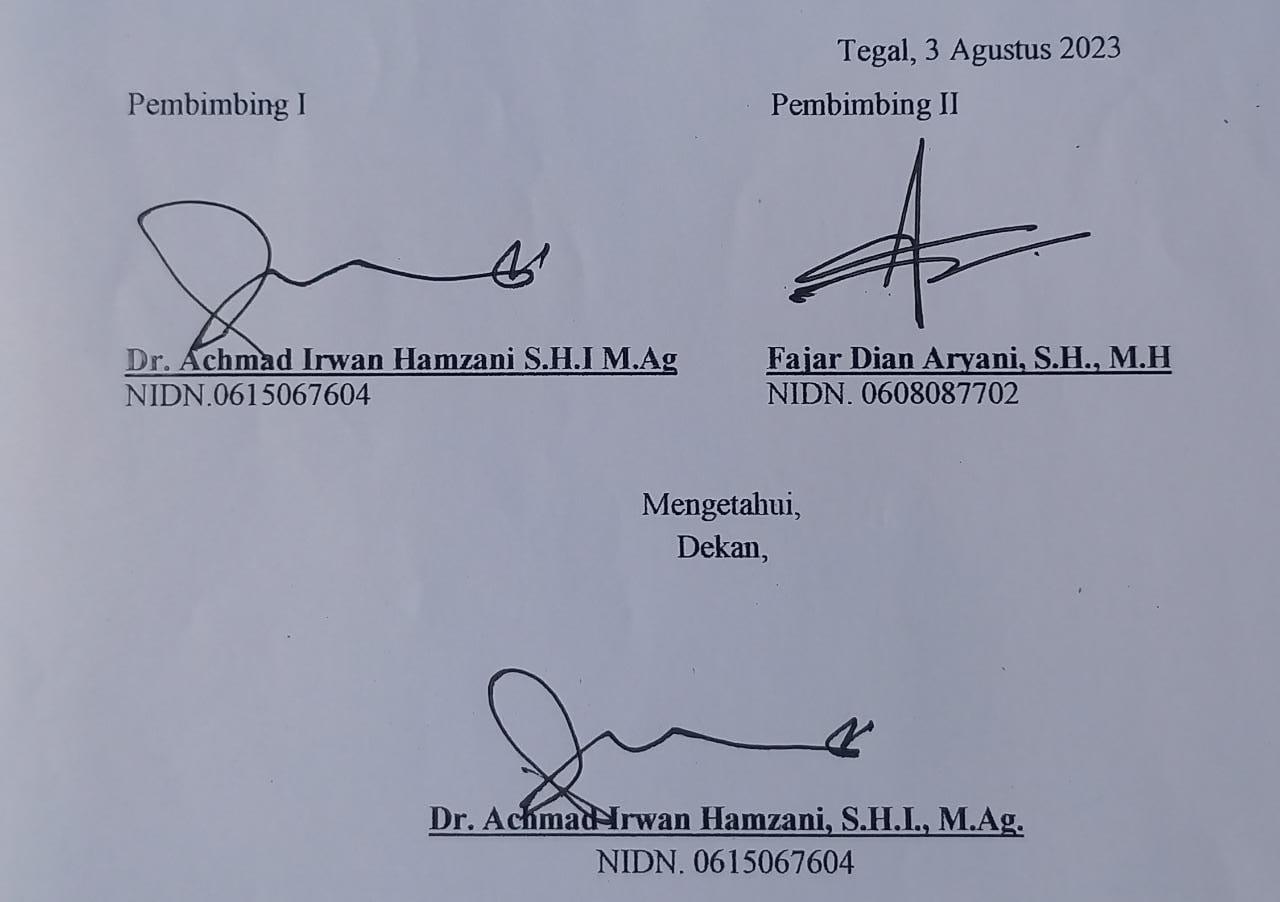
**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DITINJAU DARI PENEGAKAN HUKUMNYA**

**Gilang Ramadhan**

**NPM 5119500251**

Telah Diperiksa dan Disetujui

Oleh Dosen Pembimbing



# PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gilang Ramadhan

NPM : 5119500251

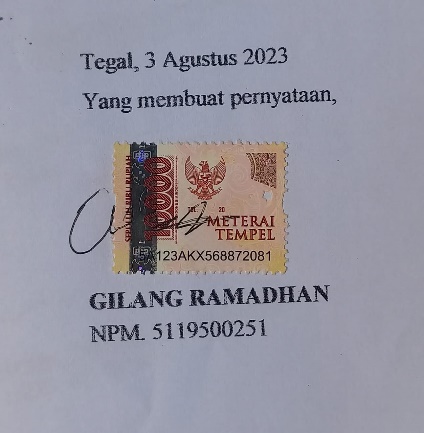
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul skripsi :KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

DITINJAU DARI PENEGAKAN HUKUMNYA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya



# ABSTRAK

Belakangan ini kasus kekerasan yang dialami perempuan sering menjadi perbincangan di sosial media. Baik berupa kekerasan perempuan di dalam lingkup rumah tangga atau pun di luar lingkup tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih didominasi korban dari pihak perempuan dan pelakunya ialah suaminya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja indikator kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif HAM dan mengkaji bagaimana penegakan hukum pada kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif HAM.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Kemudian, metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif (yuridis normatif). Metode penelitian ini mengedepankan pendekatan perundang-undangan serta konsep guna mengkaji setiap permasalahan. Beberapa perundang-undangan yang akan dikaji ialah Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kedua undang-undang ini sebagai landasan hukum dalam mengatur secara lugas hak asasi manusia serta penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Indonesia.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perspektif HAM dapat dikelompokkan menjadi empat indikator: 1) Kekerasan fisik, tindakan kekerasan fisik dalam bentuk apa pun yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga lain merupakan pelanggaran HAM. 2) Kekerasan psikis, setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan dan kehilangan rasa percaya diri hingga penderitaan psikis berat dalam lingkup rumah tangga, maka perbuatan tersebut merupakan pengabaian hak asasi manusia. 3) Kekerasan seksual, tindakan yang mencakup pemaksaan hubungan seksual kepada orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. 4) Penelantaran rumah tangga, setiap perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Selanjutnya, dalam penegakan hukum pada kasus KDRT menurut perspektif HAM ada 3 hal yang perlu ditekankan, yakni: 1) Penerapan ancaman pidana penjara dan denda yang diatur dalam pasal 44-19 UU Nomor 23 Tahun 2004. 2) Penerapan pidana tambahan yang diatur dalam pasal 50 UU Nomor 23 Tahun 2004. 3) Penerapan perlindungan dan pemulihan bagi korban yang diatur dalam pasal 16 hingga 43 UU Nomor 23 Tahun 2004.

Kata kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, penegakan hukum.

# ABSTRAC

*Recently, cases of violence against women have often been discussed on social media. Either in the form of violence against women within the household or outside that scope. Domestic violence in Indonesia is still dominated by victims from the female side and the perpetrators are their own husbands. This study aims to find out what are the indicators of domestic violence from a human rights perspective and examine how law enforcement deals with domestic violence from a human rights perspective.*

*This research is a library research. Then, the research approach method used is a normative legal approach (normative juridical). This research method puts forward a statutory approach and concepts to examine each problem. Some of the laws that will be reviewed are Law number 39 of 1999 concerning Human Rights and Law number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. These two laws serve as the legal basis for regulating human rights in a straightforward manner and eliminating domestic violence in Indonesia.*

*Domestic violence (KDRT) from a human rights perspective can be grouped into four indicators: 1) Physical violence, any form of physical violence perpetrated by family members against other family members is a violation of human rights. 2) Psychological violence, any act that causes fear and loss of self-confidence to the point of severe psychological suffering within the scope of the household, then this act is a violation of human rights. 3) Sexual violence, an act that includes forcing sexual relations against people who live within the scope of the household and coercing sexual relations for commercial purposes and or certain purposes. 4) Household neglect, any act that neglects people within the scope of the household. Furthermore, in law enforcement in cases of domestic violence from a human rights perspective, there are 3 things that need to be emphasized, namely: 1) Application of imprisonment and fines regulated in Articles 44-19 of Law Number 23 of 2004. 2) Application of additional punishment regulated in Article 50 of Law Number 23 of 2004. 3) Application of protection and recovery for victims regulated in articles 16 to 43 of Law Number 23 of 2004.*

*Keywords: Domestic violence, law enforcement.*

# PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

* Orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa dan motivasi.
* Sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mendukung dan berjuang bersama-sama dalam menggapai sarjana.
* Almamater UPS Tegal.

# MOTTO

*“Hukum tidak bisa menyelamatkan mereka yang menyangkalnya tetapi hukum juga tidak bisa melayani siapa pun yang tidak menggunakannya. Sejarah ketidakadilan dan ketidaksetaraan adalah sejarah tidak digunakannya hukum.”*

(Lyndon B. Johnson)

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai pada waktunya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala yang dihadapi tersebut dapat di atasi. Pada kesempatan ini ucapan terima penulis sampaikan kepada:

1. Bapak ................................. selaku Rektor UPS Tegal.
2. Bapak ............................................., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak ..........................., selaku Pembimbing I yang terus memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan.
4. Bapak ........................., selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis.
7. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, motivasi dan tidak pernah mengeluh dalam membimbingku menuju kesuksesan.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Tegal, 7 Agustus 2023

Penulis

# DAFTAR ISI

[PENGESAHAN i](#_Toc142330660)

[PERSETUJUAN PEMBIMBING ii](#_Toc142330661)

[PERNYATAAN iii](#_Toc142330662)

[ABSTRAK iv](#_Toc142330663)

[ABSTRAC v](#_Toc142330664)

[PERSEMBAHAN vi](#_Toc142330665)

[MOTTO vii](#_Toc142330666)

[KATA PENGANTAR viii](#_Toc142330667)

[DAFTAR ISI ix](#_Toc142330668)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc142330669)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc142330671)

[B. Rumusan Masalah 8](#_Toc142330672)

[C. Tujuan Penelitian 8](#_Toc142330673)

[D. Manfaat Penelitian 9](#_Toc142330674)

[E. Tinjauan Pustaka 9](#_Toc142330675)

[F. Metode Penelitian 12](#_Toc142330676)

[1. Jenis Penelitian 12](#_Toc142330677)

[2. Pendekatan Penelitian 12](#_Toc142330678)

[3. Sumber Data 13](#_Toc142330679)

[4. Metode Pengumpulan Data 15](#_Toc142330680)

[5. Metode Analisis Data 15](#_Toc142330681)

[G. Sistematika Penelitian 16](#_Toc142330682)

[BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 18](#_Toc142330683)

[A. Tinjauan Umum tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga 18](#_Toc142330685)

[1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga 18](#_Toc142330686)

[2. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga 19](#_Toc142330687)

[3. Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga 22](#_Toc142330688)

[B. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia 24](#_Toc142330689)

[1. Pengertian Hak Asasi Manusia 24](#_Toc142330690)

[2. Teori Hak Asasi Manusia 26](#_Toc142330691)

[3. Jenis-jenis Hak Asasi Manusia 28](#_Toc142330692)

[C. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum 37](#_Toc142330693)

[1. Pengertian tentang Penegakan Hukum 37](#_Toc142330694)

[2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 39](#_Toc142330695)

[BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42](#_Toc142330696)

[A. Indikator Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif HAM 42](#_Toc142330698)

[1. Kekerasan Fisik 44](#_Toc142330699)

[2. Kekerasan Psikis 46](#_Toc142330700)

[3. Kekerasan Seksual 49](#_Toc142330701)

[4. Penelantaran Rumah Tangga 53](#_Toc142330702)

[B. Penegakan Hukum pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif HAM 57](#_Toc142330703)

[1. Penerapan ancaman pidana penjara dan denda 61](#_Toc142330704)

[2. Penerapan pidana tambahan 64](#_Toc142330705)

[3. Penerapan perlindungan dan pemulihan bagi korban 65](#_Toc142330706)

[BAB IV PENUTUP 72](#_Toc142330707)

[A. Simpulan 72](#_Toc142330709)

[B. Saran 73](#_Toc142330710)

[DAFTAR PUSTAKA 74](#_Toc142330711)

# BAB I

# PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang**

Belakangan ini kasus kekerasan yang dialami perempuan sering menjadi perbincangan di sosial media. Baik berupa kekerasan perempuan di dalam lingkup rumah tangga atau pun di luar lingkup tersebut. Warganet atau istilah yang digunakan untuk pengguna sosial media sering kali berdiskusi melalui kolom komentar mengenai kasus kekerasan yang dialami perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya.[[1]](#footnote-1) Tidak hanya itu, kekerasan terhadap perempuan dalam ruang lingkup rumah tangga juga menjadi bahan pemberitaan oleh media *mainstream*, sehingga warganet juga ikut meluapkan kekesalan terhadap orang yang dituduh sebagai pelaku. Beberapa akun resmi media *mainstream* di antara yaitu, tempo.com, kompas.com, tribunnews.com, mediaindonesia.com, detik.com dan masih banyak lagi.

KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga mencakup segala bentuk kekerasan yang disebabkan oleh karena adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban yang terjadi dalam rumah tangga.[[2]](#footnote-2) Kekerasan yang sering dialami perempuan juga menegaskan bahwa perlindungan perempuan

di dalam ruang-ruang masyarakat masih tergolong sangat buruk. Kasus kekerasan yang dialami perempuan pada dasarnya sulit untuk diungkap. Apalagi kasus tersebut mendera perempuan yang sekaligus menjadi istri atau ibu. Perempuan yang menjadi korban biasanya cenderung menutup diri, mereka tidak berani melawan apalagi melaporkan penyiksaan yang dilakukan suaminya.[[3]](#footnote-3) Hal ini terjadi karena adanya mitos-mitos yang menyesatkan, budaya dan agama ditafsirkan secara keliru sehingga merugikan kaum perempuan.[[4]](#footnote-4)

Norma masyarakat sering kali juga membatasi perempuan dalam menyuarakan apa yang mereka alami. Pandangan-pandangan yang menganggap bahwa kekerasan perempuan yang dialami oleh seorang istri merupakan aib keluarga, sehingga tidak layak untuk dibeberkan kepada khalayak. Selain itu, pandangan patriarki semakin melemahkan kedudukan perempuan sebab ia harus patuh terhadap perintah suami. Kenyataan demikian semakin mendorong perempuan ke ruang gelap di dalam usaha melaporkan tindak kasus kekerasan di dalam rumah tangga. Penyebab lain banyak perempuan memiliki pemikiran yang romantis dan pemaaf, menganggap suaminya khilaf atau kalut karena sedang menghadapi problem di tempat kerjanya, kebanyakan perempuan langsung luluh dan cepat melupakan peristiwa yang baru dialaminya setelah suaminya meminta maaf.[[5]](#footnote-5)

Kekerasan di dalam rumah tangga di Indonesia masih didominasi korban dari pihak perempuan dan pelakunya ialah suaminya sendiri. Kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa dari kalangan apa pun, baik publik figur hingga masyarakat biasa. Berikut beberapa kasus yang dapat dirangkum di antaranya, pertama, awal tahun 2023 terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh artis Venna Melinda dengan terlapor yakni suaminya bernama Ferry Irawan. Korban melaporkan tindak kekerasan tersebut di Polda Jatim. “Akibat dari kejadian tersebut, Venna disebut mengalami luka di bagian hidung. Menurut keterangan yang diberikan oleh Venna Melinda kepada Polda Jatim, sebelumnya Ferry Irawan sudah sering melakukan ancaman kekerasan kepada Venna Melinda.”[[6]](#footnote-6)

Kedua, kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh seorang artis bernama Lesti Kejora pada 29 September 2022. Tindak kekerasan tersebut dilakukan oleh Rizky Billar yang merupakan suami dari Lesti Kejora. Berdasarkan berita CNN (13/10/22), tindak kekerasan tersebut bermula ketika Rizky ketahuan selingkuh oleh sang istri. Beberapa kekerasan yang dilakukan Rizky, yaitu mencekik dan membanting Lesti Kejora ke kasur dan ke lantai kamar mandi. “Akibat dari kekerasan tersebut, Lesti Kejora sempat dirawat di Rumah Sakit Bunda Menteng Jakarta selama dua hari. Ia dilaporkan mengalami sejumlah luka, mulai dari lebam yang sebagian besar di daerah tertutup pakaian hingga pergeseran tulang leher.”[[7]](#footnote-7)

Ketiga, pada tahun 2022 terjadi percobaan pembunuhan yang dialami oleh seorang ibu rumah tangga di Makassar, Sulawesi Selatan, nyaris dibunuh oleh suaminya sendiri. Beruntung pihak kepolisian yang sedang patroli berhasil menyelamatkan ibu hamil tua tersebut. Sementara suaminya kabur ketika melihat petugas.[[8]](#footnote-8) Keempat, kekerasan dalam rumah tangga juga dialami oleh seorang istri di Kota Tegal pada tahun 2017. Korban yang berinisial SIH (33) dipukuli oleh suaminya AAS (33) karena sang istri dianggap sering berbuat kesalahan, seperti ketika helm milik sang suami dibiarkan basah kehujanan. Tindak kekerasan ini dialami oleh korban berulang-ulang hingga sekujur tubuhnya lebam.[[9]](#footnote-9)

Berdasarkan data KDRT sepanjang 2004-2021 yang dicatat oleh Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), bahwa selama 17 tahun ada 544.452 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau ranah personal.[[10]](#footnote-10) Selanjutnya, korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia pada kurun waktu 2021 hingga 2023 mengalami jumlah kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada statistik korban KDRT yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Pada tahun 2021 jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga mencapai 15.786 korban. Sedangkan, pada tahun 2022 korban kekerasan dalam rumah tangga naik mencapai 18.138 korban. Selanjutnya, pada tahun 2023 di bulan Mei, angka KDRT mencapai 5.772 korban.[[11]](#footnote-11) Artinya, hingga pada bulan kelima tahun 2023 ini korban KDRT yang tercatat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tergolong tinggi. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan semakin naiknya kekerasan perempuan di dalam rumah tangga, menurut Niken Savitri hal ini dikarenakan beberapa hal di antaranya: “meningkatnya laporan wawasan perempuan korban atas hak-haknya, makin tingginya pemahaman penegak hukum atas kekerasan terhadap perempuan dan atau tidak efektifnya hukum memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai korban kekerasan”.[[12]](#footnote-12)

Negara Republik Indonesia yang dengan penuh kesadaran telah banyak melakukan ratifikasi perjanjian internasional, di mana salah satunya adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW (Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.[[13]](#footnote-13) Langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia merupakan bentuk nyata tanggung jawab negara terhadap hak warga negaranya. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia menjalankan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, oleh karena itu segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan wajib dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam kehidupan masyarakat hukum dapat dilihat dari beberapa sisi. Berdasarkan sisi para profesional hukum seperti hakim, jaksa, pengacara melihat hukum ialah perundang-undangan. Bagi para profesional hukum, hukum hanya ada di dalam undang-undang, sebab mereka yakin bahwa perundang-undangan itu sendiri merupakan wujud dari hukum. Para profesional adalah golongan yuris (ahli hukum) sebagai pemain, sehingga posisi ke mereka berhadapan dengan hukum adalah posisi yang melekat pada hukum. Kredo mereka adalah "menyelesaikan soal dengan menerapkan undang-undang”.[[14]](#footnote-14)

Di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur jelas oleh perundangan-undangan. Dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara, fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan sisi kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.[[15]](#footnote-15) Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan di dalam lingkup rumah tangga termasuk perampasan sisi kemerdekaan seorang istri merupakan tindakan yang dapat mengancam hak perempuan. Akan tetapi, dewasa ini kekerasan dalam rumah tangga hingga diskriminasi HAM pada diri perempuan masih saja terjadi terus-menerus di lingkungan sekitar.

Penyelesaian kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) sering kali malah mengecilkan suara perempuan sebagai korban. Padahal di dalam penyelesaian KDRT, kesaksian korban amat sangat penting dalam mendukung proses hukum. Namun, suara-suara ini terkadang terbentur oleh hukum dan norma masyarakat setempat. Boleh dikatakan bahwa masyarakat pada umumnya hanya melihat kekerasan dalam bentuk fisik, selain itu bukan dianggap sebagai bagian dari kekerasan. Keadaan ini semakin memperparah kondisi perempuan sebagai korban, sebab dari beberapa kasus KDRT pelaku tidak hanya melakukan kekerasan fisik melainkan juga kekerasan seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Selain itu, perempuan yang mengalami korban KDRT lebih memilih menyelesaikan permasalahan kasusnya melalui perceraian (yang termasuk ruang lingkup pengadilan perdata) daripada menyelesaikan kasusnya secara pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada kendala yang dihadapi perempuan yang menjadi korban KDRT, seperti peraturan hukum yang ada belum mendukung ke arah penegakan hukum yang ada.[[16]](#footnote-16) Realitas ini mempertegas bahwa hak untuk mendapatkan keadilan menjadi lebih sukar di dalam penyelesaian kasus KDRT.

Berbicara mengenai hak, tentunya setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan. Hal ini tidak luput juga terhadap hak yang dimiliki oleh perempuan sebagai istri. Pada Pasal 30 Undang-undang Hak Asasi Manusia dan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”.[[17]](#footnote-17) Sejatinya perempuan baik sebagai istri atau tidak, harus dilindungi dari adanya perlakukan kejam, kekerasan hingga perlakuan yang merendahkan derajat seorang perempuan. Sebab, pranata tersebut merupakan hak bagi perempuan untuk mendapatkan rasa aman dan kehidupan yang nyaman terbebas dari kejahatan. Di sisi lain, peran penting perempuan sebagai istri dan ibu tidak bisa disangkal merupakan nilai penting dalam pembangunan bangsa.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana indikator kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif HAM?
3. Bagaimana penegakan hukum pada kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif HAM?
4. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Mengetahui indikator kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif HAM.
2. Mengkaji penegakan hukum pada kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif HAM.
3. **Manfaat Penelitian**
4. Manfaat Teoritis**:**

Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan pembelajaran hukum atau penerapan keilmuan hukum secara lebih lanjut. Selain itu juga dapat menjadi khazanah pengetahuan ilmiah dalam bidang keilmuan hukum di Indonesia.

1. Manfaat Praktis**:**
2. Bagi Mahasiswa, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dan penegakan hukumnya.
3. Bagi Universitas, hasil dari penelitian ini memberikan referensi dalam meningkatkan kualitas universitas terkait kualitas karya tulisnya.
4. Bagi Penulis, penulis mampu menerapkan keilmuan dalam materi sub-bab aturan hukum hak asasi manusia pada kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, serta Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah memberikan perlindungan terhadap korban sebagai bentuk penegakan hukum.
5. **Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan, selanjutnya penulis akan menyajikan referensi penelitian terdahulu mengenai topik kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari perspektif HAM dan penegakan hukum guna menjadi sumber acuan di dalam penelitian ini.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Vina Ainin Salfi Yanti (2021) dengan judul “Analisis Kasus KDRT Yang Dialami Ibu Karsiwen dalam Perspektif Hukum dan HAM Serta Pemenuhan dan Perlindungan atas Hak-haknya*”*. Permasalahan dalam penelitian yakni bagaimana komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan menyikapi kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti yang dialami Ibu Karsiwen serta perspektif hukum dan HAM dalam kasus tersebut. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa maraknya kekerasan terhadap perempuan ini termasuk yang dialami oleh Ibu Karsiwen, banyak hal yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dalam rangka melakukan pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan terhadap kekerasan. Hal ini dilakukan dalam rangka melindungi para perempuan di Indonesia. Para korban kekerasan biasanya mengalami guncangan jiwa yang dapat memperburuk kondisinya jika tidak segera ditanggulangi dengan baik, oleh karena hak-hak atas korban KDRT juga diatur dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen HAM lainnya, sehingga dapat memberi pengaruh positif terhadap dirinya atas apa yang telah dialaminya.[[18]](#footnote-18)

*Kedua*, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rifa’ Rosyaadah (2021), dengan judul “Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh mengenai perlindungan HAM Perempuan terhadap kasus KDRT dalam perspektif hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa 1) kewajiban negara di bidang HAM secara konstitusional diakui oleh UUD NRI 1945 Pasal 28I Ayat (4) dan dalam Pasal 71 UU No.39 tentang HAM. Prinsip kewajiban negara menurut CEDAW antara lain menjamin HAM perempuan melalui hukum dan kebijakan selain itu negara tidak hanya menjamin namun merealisasi hak perempuan. 2) Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) memberikan formulasi baru yakni ternyata kehidupan privat juga dapat diintervensi oleh negara. HAM Perempuan yang diakui dan disepakati secara internasional yaitu hak dalam keluarga (perkawinan), politik, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, kewarganegaraan, ekonomi dan sosial dan persamaan di muka hukum.[[19]](#footnote-19)

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Noor Fatimah Azzahra (2017) dengan judul “Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia”. Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yakni 1) apa faktor penyebab timbulnya kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga? dan 2) bagaimanakah kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)?. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1) kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari kekerasan yang berbasis gender, karena kekerasan itu lahir sebagai akibat adanya ketimpangan pola relasi. 2) kekerasan di dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi maupun penelantaran rumah tangga baik secara yuridis formal (UU PKDRT) serta bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). 3) membangun pola relasi yang egaliter serta adil dan jauh dari praktik kekerasan (*violence*) dalam konteks kehidupan keluarga merupakan bagian dari tugas kemanusiaan sekaligus keagamaan.[[20]](#footnote-20)

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Nur Rochaethy (2014) dengan judul penelitian “Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa realitas yang ada di tengah masyarakat menunjukkan bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan perempuan korban kekerasan dalam bidang hukum masih sangat rendah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yaitu: substansi, struktur dan budaya.[[21]](#footnote-21)

1. **Metode Penelitian**
2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian Kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa kitab undang-undang, buku yang relevan, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.[[22]](#footnote-22) Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji informasi-informasi hukum tertulis terkait yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif). Pendekatan hukum normatif ialah dikonsepkan dalam perundang-undangan atau dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang dijadikan dasar manusia untuk berperilaku.[[23]](#footnote-23) Terdapat beberapa cara yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian hukum ini, yaitu: *statute approch* (pendekatan perundang-undangan) yang merupakan sumber hukum primer yang penulis kaji.[[24]](#footnote-24) Sumber hukum primer adalah semua produk atau dokumen hukum yang dibuat oleh pejabat negara yang menurut sistem setempat berwenang untuk membuat hukum.[[25]](#footnote-25) Pendekatan perundang-undangan difokuskan pada sinkronisasi peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual aproach*)[[26]](#footnote-26) untuk mengkaji konsep kekerasan dalam rumah tangga serta ditinjau dari perspektif HAM serta bagaimana penegakan hukumnya .

1. Sumber Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperolah dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.[[27]](#footnote-27) Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut dengan bahan sekunder.[[28]](#footnote-28) Selanjutnya, bahan hukum tersebut terbagi dalam tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berikut bahan hukum dalam penelitian ini.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer adalah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
4. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948
5. Undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)
6. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Di antara bahan sekunder dalam penelitian ini adalah, buku-buku, disertasi, tesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang perspektif HAM dan penegakan hukum pada kekerasan dalam rumah tangga.

1. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus, ensiklopedia dan lain-lain.[[29]](#footnote-29)

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.[[30]](#footnote-30) Untuk mendapatkan data yang lengkap dan komprehensif dalam penyusunan penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan studi pustaka atau dokumentasi. Studi pustaka atau dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Pustaka/dokumen yang di teliti merupakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditemukan di perpustakaan, laboratorium hukum, dan internet. Selanjutnya dilakukan inventaris dokumen-dokumen atau bahan-bahan hukum. Kemudian dianalisis dan dilakukan pembahasan sehingga akan tersusun secara sistematis data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis bahan hukum berupa *content analisis*. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah teks yang menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya[[31]](#footnote-31) terutama terkait penegakan hukum KDRT dalam perspektif HAM. Selanjutnya, data yang telah selesai dianalisis akan disajikan dalam bentuk kualitatif dan hanya menggambarkan dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan.[[32]](#footnote-32)

1. **Sistematika Penelitian**

Laporan penelitian ini disusun dalam empat bab yang masing-masing saling berkaitan. Keempat bab tersebut sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Bab ini memuat; latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika laporan penelitian mengenai kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari perspektif HAM dan penegakan hukumnya.

BAB II Tinjauan Konseptual. Bab ini memuat uraian tentang tinjauan umum mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi pengertian, bentuk-bentuk KDRT, dan faktor penyebab KDRT. Selain itu juga dipaparkan tinjauan umum mengenai hak asasi manusia yang meliputi pengertian, teori HAM, dan jenis-jenis HAM. Terakhir, uraian tentang tinjauan umum mengenai penegakan hukum yang meliputi pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

BAB III Hasil Penelitian dan pembahasan. Bab ini memuat uraian data hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis dan ditafsirkan. Data penelitian tampak jelas bagaimana disusun sesuai aturan permasalahan dalam pembahasannya yang telah dikonstelasikan dengan tinjauan konseptual berupa apa saja indikator kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif HAM serta mendeskripsikan penegakan hukum pada kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif HAM.

BAB IV Penutup. Bab ini merupakan kristalisasi semua yang telah dibahas sebelumnya dan menjawab rumusan masalah. Bab ini memuat simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan asumsi-asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, dan saran mengenai indikator kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari perspektif HAM dan penegakan hukumnya.

**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan Umum tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga**
2. **Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan menyerang fisik atau psikologis atau seksual hingga penelantaran yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban pada lingkup rumah tangga.[[33]](#footnote-33) Padahal, lazimnya rumah sering kali diartikan sebagai tempat aman bagi penghuninya. Suami, istri, hingga anak saling melindungi satu dengan yang lain. Akan tetapi, realitas aman bergeser menjadi kekhawatiran sebab tindak kasus kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi di masyarakat.

Menurut Azzahra “kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi di semua lapisan masyarakat dari kelompok masyarakat kaya sampai masyarakat miskin atau dari kelompok tidak terdidik sampai yang terdidik sekalipun.”[[34]](#footnote-34) Artinya tindak kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dialami oleh siapa saja serta kapan pun. KDRT bisa saja dilakukan oleh seorang dengan penuh kesadaran bahwa apa yang ia lakukan adalah kekerasan, namun bisa saja pelaku menganggap perilaku kekerasan yang dilakukan merupakan bagian dari hak yang ia miliki sebagai justifikasi dari otoritas yuridis atau dalil

agama.[[35]](#footnote-35) Maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga acap kali bias dalam praktiknya, sebab kultur masyarakat masih didominasi oleh relasi kuasa yang berat sebelah, yakni hubungan suami-istri hingga anak.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya telah diatur dalam UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”[[36]](#footnote-36) Selanjutnya dengan demikian dapat didefinisikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang. Dalam hal ini segala bentuk ancaman, cemooh penghinaan, mengucapkan kata-kata kasar yang terus menerus juga diartikan sebagai bentuk tindakan kekerasan. Selain itu, kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai seseorang atau untuk merusak barang, serta pula mencakup ancaman pemaksaan terhadap kebebasan individu.

1. **Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di dalam hubungan keluarga, antara pelaku dan

korbannya memiliki kedekatan tertentu. Tercakup di sini penganiayaan terhadap istri, bekas istri, tunangan, anak kandung dan anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual, atau perkosaan oleh anggota keluarga.

Menurut Hadiati Moerti Soeroso dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk-bentuk KDRT dapat dikelompokkan menjadi berikut ini.

1. Kekerasan fisik, berupa 1) Pembunuhan: a) suami terhadap istri atau sebaliknya; b) ayah terhadap anak dan sebaliknya; c) ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu); d) adik terhadap kakak, kemenakan, ipar, atau sebaliknya; e) anggota keluarga terhadap pembantu; f) bentuk campuran selain tersebut di atas. 2) Penganiayaan: a) suami terhadap istri atau sebaliknya; b) ayah terhadap anak dan sebaliknya; c) ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu); d) adik terhadap kakak, kemenakan, ipar, atau sebaliknya; e) anggota keluarga terhadap pembantu; f) bentuk campuran selain tersebut di atas. 3) Perkosaan: a) ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri; b) suami terhadap adik/kakak ipar; c) kakak terhadap adik; d) suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga; e) bentuk campuran selain tersebut di atas.
2. Kekerasan Non fisik/Psikis/Emosional, seperti: 1) penghinaan; 2) komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri; 3) melarang istri bergaul 4) ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua; 5) akan menceraikan; 5) memisahkan istri dan anak-anaknya dan lain-lain.
3. Kekerasan Seksual, meliputi: 1) Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya; 2) Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri; 3) Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi; 4) Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya.
4. Kekerasan Ekonomi, berupa: 1) Tidak memberi nafkah pada istri; 2) Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri; 3) Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.[[37]](#footnote-37)

Banyak bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang nyata-nyata dirasakan oleh kaum perempuan atau laki-laki yang menerima perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Apabila dilihat dari bentuknya, dapat dibagi dua bentuk, yaitu:

1. Kekerasan terhadap psikis, yaitu dapat berupa kekerasan yang mengakibatkan perasaan tertekan, stres, dan munculnya penyakit dalam hati.
2. Kekerasan terhadap fisik, yaitu bentuk kekerasan yang secara langsung dirasakan oleh fisik, misalnya memukul dan membunuh.

Selain kekerasan terhadap psikis dan fisik, kekerasan dalam rumah tangga terdapat bentuk kekerasan lain yaitu kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pada pasal 5 disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, ataupun penelantaran rumah tangga.[[38]](#footnote-38)

1. **Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Terdapat banyak faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, bahkan dapat dikatakan sangat kompleks. Hal ini beranjak dari kenyataan bahwa antara persoalan rumah tangga dan kekerasan tidak mudah untuk dipisahkan. Menurut Azzahra, secara sederhana penyebab kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi dua, yakni faktor eksternal dan internal. faktor eksternal meliputi relasi kuasa antara suami dan istri hingga anak, sedangkan untuk faktor internal yaitu meliputi psikis dan kepribadian.[[39]](#footnote-39) Selain itu, Barbara Krahe juga menyebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, meliputi:[[40]](#footnote-40)

1. Ketidaksetaraan kekuatan atau kekuasaan antara penganiaya dan korbannya, yang disubstansikan oleh faktor-faktor ekonomis, yang memungkinkan orang yang lebih dominan untuk memaksakan kepentingannya sendiri melalui penggunaan agresi dan ia tidak mendapatkan sanksi atas perbuatannya itu.
2. Suatu struktur normatif yang mendukung penggunaan kekerasan sebagai strategi untuk mengatasi konflik, yang menyebabkan terjadinya transmisi gaya-gaya respons agresif dari satu generasi ke generasi selanjutnya.
3. Keberadaan stresor eksternal, seperti pengangguran dan kondisi perumahan yang kumuh.
4. Pengalaman kekerasan dalam keluarga yang dilakukan orang dewasa pada masa kanak-kanak.
5. Ciri-ciri penganiaya, seperti psikopatologi individual atau keterampilan mengatasi konflik yang tidak memadai.
6. Pola-pola perilaku jangka pendek maupun jangka panjang dari orang yang menjadi targetnya, misalnya perilaku anak yang sulit atau lansia yang dependen.

Selain faktor di atas, ada beberapa faktor lain yang dapat digarisbawahi sebagai penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di antaranya: masalah keuangan, kecemburuan, keluarga, sopan santun, masa lalu hingga masalah domestik.[[41]](#footnote-41) Berdasarkan dari berbagai deskripsi mengenai penyebab KDRT, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa banyaknya faktor penyebab tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat mengerucut pada faktor individu, kultural dan ekonomi. Peran individu di sini meliputi kepribadian, psikis, sikap dan perilaku, sedangkan kultural meliputi norma dan relasi hubungan. Kemudian, ekonomi meliputi keadaan ril serta ketimpangan ekonomi masing-masing keluarga.

1. **Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia**
2. **Pengertian Hak Asasi Manusia**

Berbicara tentang hak asasi manusia maka tidak terlepas dari konteks hak yang melekat itu sendiri. Hak asasi manusia atau sering disebut dengan HAM, merupakan bahasan yang sering didiskusikan di berbagai elemen baik level pemerintahan hingga masyarakat umum. Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari *Droits de L’homme* (Prancis), *Human Rights* (Inggris), dan *Mensekelije rechten* (Belanda). Di Indonesia, hak asasi lebih dikenal dengan istilah hak-hak asasi atau dapat disebut sebagai hak fundamental.[[42]](#footnote-42) Selanjutnya, istilah hak memiliki banyak makna. Hak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau dapat juga diartikan sebagai kekuasaan untuk tidak berbuat sesuatu dan lain sebagainya. Adapun asasi berarti sifat yang paling mendasar atau fundamental.[[43]](#footnote-43) Selain itu, hak asasi manusia menurut Rizky yakni:

“Hak dimiliki manusia yang telah diperoleh dan di bawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak asasi manusia adalah kebebasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan hati nurani berkenaan dengan hal-hal yang asasi (hal yang memungkinkan untuk hidup layak). Adapun satu keharusan yang harus dilakukan oleh manusia dalam memperoleh hak- haknya disebut dengan kewajiban asasi, atau sebuah kewajiban yang harus dilakukan setelah mendapat hak asasi.”[[44]](#footnote-44)

Sejatinya, hak asasi manusia di Negara Indonesia telah di atur dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan pengertian yang sama tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka (1) bahwa:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”[[45]](#footnote-45)

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Hak Asasi Manusia itu ada beberapa jenis yang melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan sampai ke liang lahat. Hak Asasi Manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan memberi manusia kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Hal inilah yang disebut dengan akal budi di mana akal budi tersebutlah yang membimbing manusia menjalankan kehidupannya. Seyogianya, manusia harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Perampasan dan mengingkari keberadaan hak asasi manusia merupakan tindakan menjatuhkan martabat manusia. Kehadiran negara, pemerintah atau organisasi apa pun wajib mengakui dan melindungi HAM pada setiap manusia tanpa terkecuali.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji perspektif HAM dalam mengupas tindak kasus kekerasan dalam rumah tangga hingga penegakan hukumnya. Sorotan dari kaca mata HAM menjadi acuan untuk membedah bagaimana HAM melihat kekerasan dalam rumah tangga serta penegakan hukum KDRT tersebut. Selain itu, indikator kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan perspektif HAM merupakan kajian penting dalam penelitian ini.

1. **Teori Hak Asasi Manusia**

Membahas mengenai teori HAM, maka dari para kalangan ahli hukum menyebutkan bahwa terdapat 3 teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai HAM, yakni:

1. Teori Hukum Kodrati

John Locke seorang ahli fisika dan filsuf Inggris menyatakan bahwa di dalam masyarakat manusia ada hak-hak dasar manusia yang tidak dapat dilanggar oleh negara dan tidak diserahkan kepada negara. Menurut Locke hak dasar ini bahkan harus dilindungi oleh negara dan menjadi batasan bagi kekuasaan negara yang mutlak.[[46]](#footnote-46)

1. Teori Positivisme atau Utilitarian

Menurut Jeremy Bentham, eksistensi manusia ditentukan oleh tujuan atau utilitas mencapai kebahagiaan bagi sebagian besar orang. Penerapan hak atau hukum ditentukan oleh apakah hak atau hukum tersebut memberikan kebahagiaan terbesar bagi sejumlah manusia yang paling banyak. Setiap orang pada dasarnya memiliki hak, namun hak tersebut bisa hilang jika bertentangan dengan kebahagiaan dari mayoritas orang lain. Artinya, kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan masyarakat.[[47]](#footnote-47)

1. Teori Keadilan

Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positivisme. Tokoh yang mencetuskan teori keadilan adalah Ronald Drowkin dan John Rawls. Teori Drowkin mendasari negara memiliki kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama. Artinya, negara menggunakan nilai moral, kekuasaan, dan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan HAM, kecuali prinsip perlakuan sama tersebut. Selanjutnya, menurut Rawls, setiap individu memiliki hak dan kebebasan yang sama. Namun, hak dan kebebasan tersebut kerap tidak dinikmati secara bersama. Sebagai contoh, terdapat hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tapi hak ini pada faktanya tidak dapat dinikmati oleh semua orang karena kemiskinan. Untuk mengatasi isu tersebut, Rawls memperkenalkan asas perbedaan atau *difference principle* yang menyatakan bahwa distribusi sumber daya yang merata hendaknya diutamakan dalam masyarakat.[[48]](#footnote-48)

1. **Jenis-jenis Hak Asasi Manusia**

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, jenis-jenis Hak Asasi Manusia di antaranya adalah:[[49]](#footnote-49)

1. Hak Untuk Hidup

Hak untuk hidup adalah hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, dan berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 9).

Hak untuk hidup juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Akan tetapi dalam keadaan yang luar biasa demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati dapat diizinkan. Hanya saja kedua hal itu hak untuk hidup dibatasi.

1. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan adalah hak setiap orang untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah dan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 10).

1. Hak Mengembangkan Diri

Hak mengembangkan diri adalah hak setiap orang atas:

1. Pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak (Pasal 11);
2. Perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertawa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia (Pasal 12);
3. Mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia (Pasal 13);
4. Berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya (Pasal 14 ayat 1);
5. Mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia (Pasal 14 ayat 2).
6. Memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (Pasal 15);
7. Pekerjaan sosial dan kebijakan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 16).
8. Hak Memperoleh Keadilan

Hak untuk memperoleh keadilan adalah hak setiap orang tanpa diskriminasi untuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar (Pasal 17).

1. Hak atas Kebebasan Pribadi

Hak atas kebebasan pribadi menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini terdiri dari pasal 20 hingga 27, meliputi: Hak untuk tidak diperbudak, hak atas keutuhan pribadi c. hak untuk bebas memeluk agama, hak untuk bebas memilih dan dipilih, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk berpendapat, hak kewarganegaraan, dan hak bertempat tinggal.

1. Hak Atas Rasa Aman

Hak atas rasa aman pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini diatur dalam Pasal 28 sampai Pasal 35, meliputi:

1. Hak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
2. Hak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.
3. Hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
4. Hak untuk tidak diganggu di tempat kediaman oleh siapa pun.
5. Hak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
6. Hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
7. Hak untuk bebas sari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
8. Hak untuk hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
9. Hak Atas Kesejahteraan

Hak atas kesejahteraan adalah hak setiap orang atas hak milik dan pekerjaan, mendirikan serikat pekerja, bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak, jaminan sosial, bagi penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus, sedangkan yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara (Pasal 36 sampai Pasal 42).

1. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

Hak turut serta dalam pemerintahan meliputi hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, hak untuk diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan, hak untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 43 dan Pasal 44).

1. Hak Wanita

Hak-hak wanita sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 51 yaitu:

1. Hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya dalam hal pernikahan beda kewarganegaraan.
2. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi.
3. Hak untuk memilih, dipilih, diangkat, dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi.
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
5. Hak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.
6. Mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya.
7. Hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
8. Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
9. Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Hak Anak

Hak anak menurut Pasal 52 sampai Pasal 66 dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini meliputi:

“(1)Hak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. (2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya sejak dalam kandungan. (3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan sejak kelahirannya. (4) Hak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara bagi setiap anak yang cacat fisik dan atau mental. 28 (5) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali. (6) Hak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuannya sendiri. (7) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua tua atau walinya sampai dewasa. (8) Hak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. (9) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut. (10) Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. 29 (11) Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. (12) Hak untuk mencari, menerima, dam memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (13) Hak untuk istirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya. (14) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. (15) Hak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan. (16) Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya. (17) Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari 30 berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. (18) Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (19) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. (20) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. (21) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. (22) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.”[[50]](#footnote-50)

Adapun jenis-jenis hak asasi manusia menurut Piagam PBB tanggal 10 Desember 1948 meliputi:[[51]](#footnote-51)

1. Hak-hak pribadi atau *personal rights* yang merupakan hak-hak yang dimiliki masing-masing orang; yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya.
2. Hak kolektif, yakni hak masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak atas penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi yang kebebasannya dilanggar.
3. Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights* yang antara lain memuat hak-hak yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjual, serta memanfaatkannya, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk memperoleh upah yang adil bagi buruh laki-laki dan perempuan, dan hak untuk bebas dari kelaparan.
4. Hak-hak asasi politik atau *political rights* yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih dalam suatu pemilihan umum, hak untuk mendirikan partai politik, hak penentuan nasib sendiri, hak atas kehidupan, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, dan hak seseorang untuk diberitahu alasan-alasan pada saat penangkapan.
5. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau *rights of legalequality.*
6. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights* yaitu hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan.
7. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights* seperti peraturan dalam hal penahan, penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya.

Selain itu, hak asasi manusia juga disebutkan pada batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 yang secara jelas mengatur secara jelas tentang prinsip-prinsip HAM sebagai berikut:[[52]](#footnote-52)

1. Persamaan kedudukan setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1).
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2).
3. Hak untuk turut serta dalam pembelaan Negara (Pasal 27 ayat 3)
4. Hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul (Pasal 28).
5. Pasal-pasal yang secara khusus mengatur tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A-I)
6. Hak untuk bebas memeluk agama (Pasal 29).
7. Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara (Pasal 30).
8. Hak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 31).
9. Hak ikut serta dalam kegiatan perekonomian dan kesejahteraan sosial (Pasal 33).
10. Hak pemeliharaan para fakir miskin dan anak terlantar (Pasal 34).
11. **Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum**
12. **Pengertian tentang Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah perbuatan yang mengatur hubungan nilai-nilai yang dirumuskan dalam hukum-hukum yang kokoh dan dinyatakan dalam sikap perbuatan yang merupakan tahap akhir dalam pengembangan nilai untuk menciptakan, memelihara dan memelihara kehidupan sosial yang damai. Secara filosofi penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[[53]](#footnote-53) Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.[[54]](#footnote-54) Penegakan hukum bukanlah tugas penerapan hukum pada peristiwa tertentu, melainkan aktivitas manusia dengan segala karakteristiknya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh hukum.[[55]](#footnote-55)

Menurut Jimly mengenai penegakan hukum yakni,

“Istilah ‘*law enforcement*’ dalam artian Bahasa Indonesia yaitu ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit. Selain itu pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam Bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah ‘*the rule of law*’ versus ‘*the rule of just law*’. Dalam istilah ‘*the rule of law*’ terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah ‘*the rule of just law*’. Dalam istilah ‘*the rule of law and not of man*’ dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah ‘*the rule by law*’ yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.”[[56]](#footnote-56)

Dalam penegakan hukum, faktor manusia memegang peranan utama dalam penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah proses logis yang sederhana, tetapi dengan partisipasi seluruh umat manusia, penegakan hukum tidak lagi dilihat sebagai upaya nalar yang logis, tetapi sebagai hasil dari suatu pilihan. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak bisa hanya didasarkan pada prediksi logis, tetapi juga pada isu-isu “non-logis”. Penegakan hukum dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan tugas ini, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pejabat pemerintah.

Pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari objeknya, yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini makna juga mencakup makna luas dan makna terbatas. Secara umum penerapan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan resmi yang sehat dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun penerapan hukum dalam arti sempit hanya dapat melibatkan penerapan peraturan formal dan tertulis.[[57]](#footnote-57)

Berdasarkan paparan mengenai pengertian penegakan hukum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formal yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

1. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[[58]](#footnote-58)

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di atas dapat dirangkum ke dalam suatu sistem hukum (*legal system*) yang menurut Friedman meliputi: Substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Subtansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Kemudian, struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka. Terakhir, budaya hukum berhubungan dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.[[59]](#footnote-59)

Ketiga komponen hukum itu harus saling menunjang satu sama lain secara *integrative* agar hukum tersebut berlaku efektif. Umpamanya suatu substansi hukum (norma hukum) tidak dapat ditegakkan tanpa adanya dukungan dari struktur hukum dan budaya hukum yang menggerakkannya. Dengan demikian, apabila bicara tentang faktor penegakan hukum maka pada hakikatnya bicara mengenai ide-ide itu ternyata membutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum, organisasi dan masyarakat yang secara bersama-sama disiplin dalam upaya menegakkan hukum.

Di dalam penelitian ini, penegakan hukum yang akan dibahas adalah penegakan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Penulis akan melihat seberapa jauh penegakan hukum khususnya dalam tindak kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia secara umum. Selain itu, pranata hukum yang ada di masyarakat hingga penindakan hukumnya akan menjadi kajian mendalam oleh penulis.

# BAB III

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. **Indikator Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif HAM**

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dan tentu bagian kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Tidak hanya itu, perlakuan diskriminasi dalam rumah tangga juga merupakan bagian dari pelanggaran HAM. Perlu ditegaskan bahwa hak asasi manusia ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.[[60]](#footnote-60) Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Beranjak dari definitif tersebut, maka perlindungan hak asasi manusia pada tindak kekerasan dalam rumah tangga sepatutnya didasari atas kesadaran individu, masyarakat dan negara.

Seyogianya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat menimpa siapa saja dalam anggota keluarga, baik suami, istri maupun anak. Artinya, baik laki-laki atau perempuan serta anak-anak sangat berpeluang mengalami tindak KDRT. Namun realitasnya, perempuan dan anak-anaklah yang lebih banyak menjadi objek kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat. Meski demikian, kenyataan tersebut bukan otomatis mengecilkan unsur laki-laki sebagai korban. Apabila

dikaitkan dengan fenomena perempuan, maka yang berkembang selama ini menganggap bahwa kaum perempuan cenderung dilihat sebagai “korban” dari berbagai proses sosial yang terjadi dalam masyarakat selama ini. Oleh karena itu, sekecil apa pun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum.[[61]](#footnote-61)

Berdasarkan kasus-kasus kekerasan perempuan yang banyak terjadi terutama di Indonesia menjadi masalah krusial untuk segera diselesaikan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menjalar di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa.[[62]](#footnote-62) Kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[[63]](#footnote-63) Padahal Indonesia pada tanggal 29 Juli 1980 telah menandatangani Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau yang lebih dikenal dengan *Convention on the Elimination of All Dorms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Pada dasarnya, isi dari konvensi tersebut sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menetapkan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Jika ditinjau melalui perspektif HAM, maka kekerasan dalam rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi beberapa indikator sebagai berikut.

1. Kekerasan Fisik

Berbicara mengenai indikator pertama yakni kekerasan fisik maka tidak bisa terlepas dari bayangan awal mengenai tindak kejahatan melukai dan sebagainya. Hal ini tentu saja tepat, karena pada dasarnya kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit dan atau luka berat.[[64]](#footnote-64) Contoh kekerasan dengan cara ini antara lain berupa: memukul, menampar, menendang, menarik rambut, menyundut dengan api rokok, melukai dengan senjata dan lain sebagainya.[[65]](#footnote-65) Di sisi lain, dalam pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 juga mempertegas bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau terluka berat.[[66]](#footnote-66) Tentu, batasan di sini ialah segala bentuk macam kekerasan fisik yang menimpa anggota keluarga.

Kekerasan fisik dalam kasus KDRT pada hakikatnya bertentangan dengan hak asasi manusia. Hal ini telah lama menjadi isu utama HAM internasional. Masyarakat dunia menyoroti bahwa kekerasan dalam rumah tangga masif terjadi di bumi belahan mana pun. Tidak hanya itu, perkembangan ideologi dan kultur patriarki semakin memperburuk tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”.[[67]](#footnote-67) Artinya, setiap anggota keluarga berhak mendapatkan kehidupan serta keselamatan. Tidak ada satu pun orang atau anggota keluarga yang boleh menyakiti atau melukai fisik kepada anggota keluarga lain (suami, istri, anak, dan anggota keluarga lain yang tinggal satu atap). Terlebih tindakan mengambil hak hidup dan keselamatan anggota keluarga merupakan bentuk tindakan merampas harkat martabat seseorang sebagai manusia. Kondisi demikian juga disebutkan dalam pasal 5 DUHAM Tahun 1948 yang berbunyi “tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina”.[[68]](#footnote-68) Padahal, seharusnya keluarga merupakan ruang aman yang dapat melindungi setiap anggota. Rasa aman, keselamatan dan kebahagiaan adalah jaminan yang sudah selayaknya di produksi oleh ruang intim yang disebut dengan keluarga. Akan tetapi, realitas di dalam masyarakat sering kali menunjukkan hal sebaliknya.

Di Indonesia, perlindungan hak asasi manusia tertuang dalam pasal 28A-J Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Negara hadir mengakui dan menjunjung tinggi HAM (pasal 2). Tindakan kekerasan fisik dalam bentuk apa pun yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga lain merupakan pelanggaran HAM. Hal ini sesuai dengan pasal 28B (2) UUD NRI 1945 bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.[[69]](#footnote-69) Selain itu, dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai tindakan kekerasan fisik.

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun”[[70]](#footnote-70)

Selain penekanan pada kekerasan fisik pada konteks KDRT, dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 5 (3) juga memberikan perlindungan lebih terhadap perempuan dan anak-anak sebagai kelompok rentan mengalami kekerasan.

1. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan dan kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.[[71]](#footnote-71) Contoh kekerasan dengan cara ini dapat berupa antara lain: tindakan penghinaan, pendapat atau komentar yang merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti yang bertujuan untuk memaksakan kehendak si pelaku.[[72]](#footnote-72) Kekerasan psikis ini dapat memperburuk mental seseorang. Antar anggota keluarga terkadang tanpa disadari melakukan demikian. Entah antara orang tua kepada anak atau sebaliknya. Demikian pula hubungan suami-istri juga tidak luput terhadap praktik kekerasan psikis antar satu sama lain. Unsur kesengajaan sangat dimungkinkan terhadap kekerasan psikis, apalagi ada anggapan remeh terhadap bentuk kekerasan tersebut. Lebih mirisnya lagi, masyarakat juga turut andil dalam menormalisasi bentuk kekerasan psikis sebagai bentuk kewajaran. Padahal dampak kekerasan psikis mampu memperburuk keadaan seorang ibu atau bapak dalam merawat keluarganya. Selain itu, juga dapat memudarkan kepercayaan diri seorang anak dalam tahap perkembangan hidupnya hingga yang paling parah yakni mendorong untuk bunuh diri.[[73]](#footnote-73)

Begitu dahsyatnya dampak kekerasan psikis merupakan akibat pengabaian hak asasi manusia. Keluarga yang sejatinya harus selalu memproduksi dukungan moral terhadap setiap anggota keluarga, malah berlaku menyerang. Oleh karena itu, perlu digaris bawahi bahwa kekerasan psikis sama jahatnya dengan bentuk kekerasan lain. Kekerasan psikis juga merenggut dan menodai martabat manusia. Padahal dalam pasal 28G (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia ...”,[[74]](#footnote-74) artinya setiap orang harus terbebas dari penyiksaan baik fisik atau non fisik termasuk perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia. Selain itu, kekerasan psikis juga diatur dalam pasal 5 DUHAM yang juga menyebutkan bahwa tidak seorang pun boleh berbuat kejam terhadap orang lain termasuk dalam segala bentuk jenis kekerasan psikis. Perlakuan diskriminasi juga tidak diperbolehkan dalam level apa pun termasuk dalam level rumah tangga.

Pasal 7 DUHAM menegaskan bahwa perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Artinya, di dalam menegakkan HAM khususnya dalam tindakan kekerasan psikis maka korban harus dilindungi penuh secara hukum tanpa adanya diskriminasi. Baik berupa diskriminasi gender, ras, agama, dan sebagainya. Sebab, biasanya dalam menegakkan keadilan HAM pada kekerasan psikis yang dialami oleh seorang istri akan bersinggungan langsung dengan kebiasaan patriarki yang masih melekat di masyarakat Indonesia. Seperti contoh bahwa perkataan suami yang cenderung merendahkan serta mencederai psikis istri dianggap sebagai perkataan wajar untuk menasihati istri demi kebaikan bersama. Di lain hal, perkataan kasar dan menyerang mental anak juga sering dianggap sebagai salah satu cara yang tepat untuk mendidik seorang anak. Kenyataan demikian semakin menegaskan bahwa penegakkan hak asasi manusia dalam ranah kekerasan psikis masih terdapat banyak ganjalan pada masyarakat.

Padahal dalam UUD NRI 1945 pasal 28I (2) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.[[75]](#footnote-75) Selanjutnya dipertegas kembali pada pasal 4 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa tidak dibenarkan adanya penyiksaan (baik fisik atau non fisik) dan diskriminasi atas sesama individu. Karena dasar pemikiran pembentukan undang-undang ini adalah antara lain untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tanpa hal tersebut, manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*).[[76]](#footnote-76) Oleh karena itu, tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak menghormati hak asasi orang lain di dalam rumah tangga tersebut.

1. Kekerasan Seksual

Di Indonesia, kekerasan seksual akhir-akhir ini sering diperbincangkan oleh masyarakat melalui sosial media. Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi membuat masyarakat semakin khawatir suatu saat menjadi korban kekerasan tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan pelaku kekerasan seksual ialah orang terdekat. Ruang aman dalam lingkup keluarga pun tidak dapat menjamin untuk terhindar dari tindak kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah tindakan yang mencakup pemaksaan hubungan seksual kepada orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.[[77]](#footnote-77) Dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan secara gamblang mengenai kekerasan seksual. Hal ini mengindikasikan bahwa negara hadir untuk menjaga dan menjunjung tinggi harkat martabat warga negara sebagai sejatinya manusia.

Bicara mengenai tindak kekerasan seksual di Indonesia, beberapa tahun belakangan ini muncul pro-kontra mengenai RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) hingga RUU tersebut disahkan menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022. Ada beberapa pokok bahasan dalam undang-undang ini yang tarik-ulur, seperti poin pemerkosaan dan aborsi yang akhirnya dihapus. Padahal dua poin tersebut masuk dalam usulan RUU TPKS. Persoalan ini yang banyak diprotes oleh aliansi masyarakat seperti Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) dan Forum Pengada Layanan (FPL).[[78]](#footnote-78)  Sebenarnya, undang-undang terkait kekerasan seksual pertama kali diinisiasi Komnas Perempuan pada 2012, dengan nama awal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Namun baru meminta naskah akademiknya pada 2016, empat tahun setelahnya. Akhirnya, UU TPKS (pasal 4) memasukkan sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual non-fisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; kekerasan seksual berbasis elektronik; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; dan perbudakan seksual.[[79]](#footnote-79)

Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS didasarkan pada asas “penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum”.[[80]](#footnote-80) Hal demikian mempertegas bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan yang merenggut harkat martabat seseorang. Tindakan keji pelaku kekerasan seksual kepada korban tidak dapat dinormalisasi dengan alasan apa pun, termasuk dalam lingkup rumah tangga. Tujuan disahkan UU TPKS ialah untuk mencegah hingga menangani kasus kekerasan seksual yang dialami korban. Bahkan UU ini berguna untuk memastikan tindakan serupa tidak terjadi kembali terhadap korban (Pasal 3).

Kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan tindak kejahatan yang bertentangan dengan pelindungan hak asasi manusia seseorang. Hal ini sesuai dengan pasal 28G (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.[[81]](#footnote-81) Selain itu, dalam pasal 8 UU Nomor 23 tahun 2004 juga menjelaskan bahwa kekerasan seksual tidak hanya meliputi pemaksaan dalam lingkup rumah tangga namun juga dengan tujuan komersial atau tujuan lain. Oleh karena itu, tindak kekerasan seksual dapat mengindikasikan adanya praktik jual beli demi mendapatkan keuntungan materi dan atau seksual. Hal ini bertolak belakang dalam pasal 4 DUHAM yang menyatakan bahwa “Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang”.[[82]](#footnote-82) Selain itu, UU HAM di Indonesia juga mengatur pelarangan tersebut yang terdapat dalam pasal 20, menyatakan bahwa:

1. Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
2. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.[[83]](#footnote-83)

Korban kekerasan seksual yang dipaksa berhubungan intim dengan orang lain yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri, seperti contoh kasus seorang anak dijual orang tuanya kepada orang lain sebagai pemuas hasrat merupakan praktik perbudakan. Sebab pada hakikatnya setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya (pasal 29 ayat 1 UU HAM).[[84]](#footnote-84) Perlu ditegaskan bahwa segala hal yang berhubungan dengan seksualitas merupakan hak mutlak pribadi seseorang. Artinya, tidak boleh adanya paksaan dalam bentuk apa pun kepada seseorang agar mau berhubungan seks. Tindakan pemaksaan hingga perbudakan seks merupakan pelanggaran HAM keji yang sudah semestinya dapat diantisipasi dan ditindak berdasarkan keadilan hukum hak asasi manusia.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga biasanya menimpa perempuan dan anak-anak. Namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban. Akan tetapi, kelompok rentan yang seharusnya dilindungi malah menjadi sasaran empuk tindak kekerasan seksual. Hal ini juga diatur dalam pasal 30 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.[[85]](#footnote-85) Lingkup terdekat yaitu keluarga sudah semestinya melindungi hak aman anggota keluarganya. Segala ancaman yang mendera seseorang anggota keluarga merupakan ancaman pula untuk anggota keluarga lain. Sepatutnya masing-masing anggota keluarga saling melindungi, menjadikan tempat paling aman untuk orang yang disayangi. Tidak hanya sebatas lingkup keluarga, negara juga harus menjamin rasa aman dan tenteram warga negaranya termasuk memastikan bahwa kekerasan seksual ditindak secara tegas.

1. Penelantaran Rumah Tangga

Indikator terakhir dalam kekerasan rumah tangga menurut perspektif HAM ialah tindakan penelantaran rumah tangga. Hal ini biasanya terjadi akibat ranah ekonomi. Meski demikian, penelantaran ekonomi dalam rumah tangga terdapat banyak penyebab, sehingga tidak bisa disimpulkan begitu saja. Menurut pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT mengatur penelantaran rumah tangga sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.[[86]](#footnote-86)

Berdasarkan pasal 9 tersebut, maka sudah sangat jelas bahwa setiap anggota keluarga tidak boleh ditelantarkan atau menelantarkan anggota keluarga lainnya bahkan wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada anggota keluarganya. Selain itu pembatasan gerak seseorang dalam memenuhi ekonominya juga merupakan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Seperti contoh ada seorang istri yang dilarang bekerja oleh suaminya karena alasan tidak logis, misal khawatir pemasukan istri lebih besar dari suami atau karena alasan cemburu. Contoh lain yakni seorang anak yang masih di bawah umur dipaksa bekerja oleh orang tuanya untuk menutupi kebutuhan ekonomi. Padahal kewajiban memenuhi ekonomi anak berada di tangan orang tuanya, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Kondisi demikian bertentangan dengan perlindungan HAM yang diatur dalam pasal 28C UUD NRI 1945.

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.[[87]](#footnote-87)

Berdasarkan pasal 28C tersebut maka hak untuk bekerja sesuai dengan keinginan serta pemenuhan kebutuhan merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia. Baik laki-laki atau perempuan memili hak yang sama. Dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan bahwa setiap orang berhak memperjuangkan dan mengembangkan dirinya termasuk memilih pekerjaan. Di sisi lain, pembatasan-pembatasan ruang gerak dalam pengembangan diri dan ekonomi yang berlatar belakang oleh doktrin suatu agama serta kultur, sudah semestinya dapat disisihkan.

Idealnya, dalam lingkup rumah tangga pembagian tugas antara suami dan istri seimbang. Memang dalam pandangan hak asasi manusia tidak membenarkan bahwa yang harus bekerja adalah laki-laki atau perempuan. Namun keduanya memiliki kesempatan hak yang sama untuk bekerja. Dalam pasal 51 UU Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

1. Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
2. Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
3. Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[[88]](#footnote-88)

Berdasarkan pasal 51, dapat digarisbawahi bahwa hak antara suami-istri itu setara baik ketika masih ikatan pernikahan hingga setelah resmi bercerai. Hak tersebut meliputi hak asuh anak dan kepemilikan harta bersama. Akan tetapi, persoalan ini tentu tidak mudah diselesaikan apabila dialog antar suami-istri mengalami kebuntuan. Pembagian tugas dalam rumah tangga juga harus memperhatikan hak suami-istri sebagai manusia yang bermartabat. Hal ini juga berlaku pada tugas memelihara anak dan menentukan jenis pekerjaan antara suami-istri. Keadaan demikian juga telah diatur dalam pasal 23 (1) DUHAM yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pekerjaan...”.[[89]](#footnote-89) Artinya, suami-istri memiliki hak yang sama dalam menentukan pekerjaan. Namun, di luar dari hal tersebut juga perlu diperhatikan bahwa tidak hanya persoalan pekerjaan, melainkan tugas membesarkan anak dan merawat orang tua merupakan tugas bersama yang wajib dilaksanakan dengan baik.

Kasus penelantaran rumah tangga baik yang dilakukan oleh seorang bapak atau ibu telah melanggar pasal 12 UU Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.[[90]](#footnote-90) Pada dasarnya, hak asasi anak direnggut karena adanya praktik penelantaran semacam ini. Hak tumbuh, berkembang serta memaksimal potensi yang dimiliki anak dapat begitu saja sirna akibat penelantaran yang dilakukan oleh orang tuanya. Realitas penelantaran anak bertentangan dengan prinsip hak anak yang diatur dalam UU Nomor 39 tahun 1999 bagian kesepuluh tentang hak anak, meliputi pasal 52 hingga 66 yang seluruhnya bertujuan untuk melindungi dan memastikan bahwa hak anak dipenuhi secara maksimal.

Keadaan penelantaran ekonomi dalam rumah tangga semakin diperparah sebab di Indonesia masih lazim ditemui seorang perempuan pasca menikah dibatasi agar tidak bekerja. Hal ini merupakan praktik dominasi laki-laki dalam kultur masyarakat Indonesia (patriarki). Akhirnya, ketergantungan ekonomi terhadap suami dapat secara tiba-tiba mengancam keberlangsungan sosial-ekonomi keluarga apabila terjadi perselisihan, semisal perceraian. Dengan demikian, hak hidup yang layak dalam rumah tangga seyogianya merupakan tanggung jawab bersama yang meliputi kewajiban anggota keluarga, masyarakat serta negara. Ketentuan ini diatur dalam pasal 41 (1) UU Nomor 39 Tahun 1999, bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.[[91]](#footnote-91)

1. **Penegakan Hukum pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif HAM**

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, telah lahir berbagai instrumen yuridis sebagai kebijakan pemerintah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang menghormati hak asasi manusia (HAM) dan egaliter, khususnya aturan-aturan hukum yang digunakan dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun upaya perlindungan dari tindak pidana kekerasan dalam lingkup keluarga (rumah tangga) baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.[[92]](#footnote-92) Lahirnya undang-undang tersebut merupakan upaya penegakan keadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 membuat masyarakat dan terkhusus korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki kekuatan dan berani menuntut keadilan hukum baginya. Sebab, sering kali korban tidak berani *spek up* bahkan lapor ke polisi karena ketidakberdayaan menghadapi situasi hukum. Padahal terlepas dari UU tersebut, korban berhak memperjuangkan harkat martabatnya dan menuntut hak keadilan terhadap kekerasan yang menimpa dirinya. Anggapan sepele terhadap berbagai jenis kekerasan yang ada dalam rumah tangga harus segera dihapus. Edukasi serta pendampingan terhadap masyarakat khususnya korban dapat dilakukan oleh negara hingga organisasi bantuan hukum.

Penegakan hukum pada kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif HAM lebih dominan mengutamakan hak keselamatan dan pemulihan korban. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab dalam penanganan kasus kejahatan HAM termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam bab V pasal 71 menyatakan bahwa:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”[[93]](#footnote-93)

Di sisi lain, hadirnya pemerintah dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif HAM yakni melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau sering disebut dengan Komnas HAM. Keberadaan Komnas HAM sendiri diatur dalam Bab VII Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 75, bahwa tujuan dibentuknya Komnas HAM yaitu:

1. mengembangkan kondisi yang konduksif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
2. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Tugas yang diemban oleh Komnas HAM sepenuhnya untuk melindungi dan menegakkan HAM di Indonesia. Apabila ditarik pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka Komnas HAM menjadi salah satu garda terdepan yang harus ikut serta mengawal dan mendampingi penyelesaian KDRT. Selain itu, hadirnya Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menjadi bagian penting dalam pendampingan KDRT terutama melindungi kelompok rentan kekerasan yakni perempuan dan anak-anak.

Penyelesaian kasus KDRT melalui “catahu” yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan tahun 2021 yakni terdapat tiga pola penyelesaian kasus KDRT yaitu: (1) Penyelesaian Non Hukum (29%), (2) Penyelesaian Hukum (29%) dan (3) Tidak Teridentifikasi (N/A) (39%). Penyelesaian hukum yang teridentifikasi adalah penyelesaian melalui jalur perdata (8%) dan penyelesaian melalui jalur pidana (24%) yang dalam proses penulisan catahu terdapat dalam tingkat pemeriksaan yang berbeda, yaitu penyidikan, penuntutan dan vonis hakim, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Penyelesaian non hukum yang dimaksud adalah penyelesaian secara musyawarah yang difasilitasi oleh LSM sebanyak 1.043 kasus, P2TP2A sebanyak 526 kasus dan WCC sebanyak 214 kasus. Namun, data yang masuk belum dapat mengidentifikasi jenis-jenis kasus yang penyelesaiannya dilakukan dengan pendekatan non hukum. Dalam penyelesaian kasus pidana terdapat 13 kasus yang mendapatkan restitusi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak atas pemulihan korban mulai diberlakukan.[[94]](#footnote-94)

Berdasarkan catatan tahunan yang dikeluarkan Komnas Perempuan tersebut, terlihat bahwa persentase terbesar dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yakni kategori “tidak teridentifikasi”. Fakta ini menunjukkan masih adanya celah untuk meloloskan pelaku KDRT dari tuntutan hukum. Sebagaimana diketahui mediasi atau upaya damai telah banyak digunakan sebagai alternatif dalam penyelesaian kasus-kasus KDRT, hingga kasus tidak diteruskan ke pengadilan. Penanganan kasus KDRT yang tiba-tiba surut begitu saja sering diklaim sebagai upaya untuk mencapai keadilan restorative (*restorative justice*).[[95]](#footnote-95) Padahal dalam pelaksanaannya keadilan restorative memiliki sejumlah prasyarat yakni yang utama memberi tekanan pada kepentingan korban sebagai pihak yang secara langsung terkena dampak kejahatan, termasuk keluarga korban, dan masyarakat luas yang terkena dampaknya serta partisipasi penuh korban dan pihak lain yang terdampak.

Nahasnya, mekanisme keadilan restoratif yang dipraktikkan pada kasus-kasus KDRT hanya bertujuan untuk menghentikan kasus atau menghindari proses peradilan pidana yang dianggap tidak efektif, lama, dan mahal sehingga terjadi penumpukan perkara, tanpa menyelesaikan akar masalah KDRT, yakni penggunaan kekuasaan dan kontrol dalam konteks rumah tangga, hingga KDRT terus berulang. Dampak pelaksanaan mekanisme ini, tidak menguntungkan korban melainkan lebih menguntungkan pelaku dan aparat penegak hukum.[[96]](#footnote-96) Oleh karena itu perlu adanya keseriusan serta kesungguhan pemerintah dalam penanganan kasus KDRT .

Di Indonesia, dalam pengungkapan hingga penuntutan kasus kekerasan dalam rumah tangga memang harus diakui banyak hambatan. Terlebih lagi, dalam penanganan kekerasan psikis dan seksual. Namun, hukum harus tetap tegak dan pelaku dapat dihukum dengan seadil-adilnya. Beranjak dari hal ini, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam usaha penegakan hukum pada kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif HAM.

1. Penerapan ancaman pidana penjara dan denda

Penerapan ancaman pidana dan perdata kepada pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga telah diatur melalui instrumen hukum. Undang-undang khusus yang mengatur tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun pasal-pasal yang dapat menjerat pelaku tindak KDRT sebagai berikut:

1. Pasal 44
2. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
6. Pasal 45
7. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
8. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
9. Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

1. Pasal 47

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

1. Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

1. Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).[[97]](#footnote-97)

Berdasarkan pasal-pasal tuntutan hukum baik pidana penjara atau denda di atas, sudah meliputi tuntutan terhadap berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga yakni: kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Selanjutnya, praktik penerapan pasal tersebut harus dikawal dengan baik agar tepat hukum tanpa adanya penyimpangan. Meski demikian, sayangnya dalam KUHP baru yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak secara spesifik mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, dalam KUHP baru hanya mengatur tentang tindak kekerasan umum dan kekerasan seksual. Namun, dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 ini terbilang berat dibanding dengan KUHP yang menjatuhkan sanksi pidana rata-rata di bawah 5 (lima) tahun untuk tindak penganiayaan.

1. Penerapan pidana tambahan

Selain ancaman pidana penjara dan denda sesuai dengan pasal 44 hingga 49, dalam UU Nomor 23 tahun 2004 juga mengatur mengenai penerapan pidana tambahan dalam tindak KDRT. Hal ini diatur dalam pasal 50 sebagai berikut.

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

1. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
2. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.[[98]](#footnote-98)

Jika dicermati lebih mendalam, penambahan pidana tambahan tersebut merupakan wujud keadilan HAM yang bertujuan untuk melindungi dan memulihkan kondisi korban serta merespons kebutuhan untuk mencegah berlanjutnya ancaman tindak KDRT. Selain itu, penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu juga bagian dari pemenuhan hak pelaku, yakni hak untuk dibimbing agar dapat mengoreksi apa yang pelaku perbuat dalam KDRT. Inisiatif untuk merancang program dan menyenggarakan konseling bagi pelaku KDRT sudah dimulai oleh Mitra Perempuan bekerja sama dengan sejumlah konselor laki-laki dari profesi terkait dan petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang mempersiapkan modul untuk layanan konseling yang dibutuhkan.[[99]](#footnote-99)

1. Penerapan perlindungan dan pemulihan bagi korban

Dalam kasus KDRT, pendamping dan penegak hukum harus memahami betul bahwa keutamaan kasus ini yakni melindungi korban. Karena bentuk kekerasan yang terjadi bukan semata-mata kekerasan fisik, melain juga kekerasan psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Banyaknya jenis kekerasan yang terjadi dalam tindak kasus KDRT, maka pendamping dan penegak hukum harus paham betul panduan penanganan KDRT terkhusus dalam mendampingi Korban. Undang-undang Nomor 23 tahun 2005 tentang KDRT telah mengatur panduan sedemikian rupa dalam melindungi korban KDRT.

1. Pasal 16
2. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
3. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
4. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
5. Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

1. Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

1. Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

1. Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang : a.) identitas petugas untuk pengenalan kepada korban; b.) kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan c.) kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

1. Pasal 21
2. Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus : a.) memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya; b.) membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
3. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
4. Pasal 22
5. Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus : a.) melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban; b.) memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; c.) mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan d.) melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
6. Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
7. Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat : a.) menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping; b.) mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; c.) mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan d.) memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

1. Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

1. Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib: a.) memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan; b.) mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau c.) melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

1. Pasal 26
2. Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
3. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
4. Pasal 27

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pasal 28

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

1. Pasal 29

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh: a.) korban atau keluarga korban; b.) teman korban; c.) kepolisian; d.) relawan pendamping; atau e.) pembimbing rohani.

1. Pasal 30
2. Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
3. Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
4. Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.
5. Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.
6. Pasal 31
7. Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk: a.) menetapkan suatu kondisi khusus; b.) mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
8. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.
9. Pasal 32
10. Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
11. Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
12. Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.
13. Pasal 33
14. Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
15. Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.
16. Pasal 34
17. Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.
18. Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.
19. Pasal 35
20. Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.
21. Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
22. Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).
23. Pasal 36
24. Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.
25. Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
26. Pasal 37
27. Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
28. Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.
29. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.
30. Pasal 38
31. Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.
32. Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.
33. Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.[[100]](#footnote-100)

Selain perlindungan korban, UU Nomor 23 tahun 2004 juga mengatur tentang bagaimana pemulihan korban tindak KDRT. Hal ini dapat dilihat pada pasal-pasal di bawah ini.

1. Pasal 39

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari : a.) tenaga kesehatan; b.) pekerja sosial; c.) relawan pendamping; dan/atau d.) pembimbing rohani.

1. Pasal 40
2. Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
3. Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.
4. Pasal 41

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

1. Pasal 42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

1. Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.[[101]](#footnote-101)

Berdasarkan pasal 16 hingga 43, maka perlindungan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal terpenting selain penindakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan. Hal inilah yang harus dipahami oleh Aparat Penegak Hukum (APH) di Indonesia dengan baik. Meski demikian, para APH dalam menangani kasus KDRT meyakini bahwa mereka senantiasa berusaha untuk memegang teguh dan melaksanakan prinsip netralitas, obyektivitas, dan rasionalitas tersebut. Namun netralitas, objektivitas, dan rasionalitas seperti apa yang diterapkan APH patut dipertanyakan. Hal inilah yang menjadi kendala dalam penanganan KDRT, yang kemudian diharapkan dapat segera dibenahi secara optimal. Sepatutnya, penegakan hukum di Indonesia pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat berpijak pada perspektif HAM. Karena, jika mengacu pada asas-asas dasar HAM, Bab 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, menyatakan bahwa “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.[[102]](#footnote-102)

# BAB IV

# PENUTUP

1. **Simpulan**
2. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perspektif HAM dapat dikelompokkan menjadi empat indikator: a) Kekerasan fisik, tindakan kekerasan fisik dalam bentuk apa pun yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga lain merupakan pelanggaran HAM. b) Kekerasan psikis, setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan dan kehilangan rasa percaya diri hingga penderitaan psikis berat dalam lingkup rumah tangga. c) Kekerasan seksual, tindakan yang mencakup pemaksaan hubungan seksual kepada orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. d) Penelantaran rumah tangga, setiap perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.
3. Ada 3 hal yang perlu ditekankan dalam penegakan hukum pada kasus KDRT menurut perspektif HAM, yakni: a) Penerapan ancaman pidana penjara dan denda yang diatur dalam pasal 44-19 UU Nomor 23 Tahun 2004. b) Penerapan pidana tambahan yang diatur dalam pasal 50 UU Nomor 23 Tahun 2004. c) Penerapan perlindungan dan pemulihan bagi korban yang diatur dalam pasal 16 hingga 43 UU Nomor 23 Tahun 2004.
4. **Saran**
5. Bagi pemerintah diharapkan dapat mewujudkan keadilan hukum pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan orientasi menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus mendorong langkah-langkah strategis pencegahan hingga penegakan hukum pada kasus KDRT secara ideal sesuai perundang-undangan yang berlaku.
6. Bagi perangkat penegak hukum diharapkan dapat lebih memperhatikan korban kekerasan dalam rumah tangga mulai dari tahap pelaporan hingga penyidikan. Selain itu, penindakan tersangka kasus KDRT dapat diterapkan lebih tegas sesuai dalam UU Nomor 23 Tahun 2004, sehingga dapat memunculkan efek jera yang berkelanjutan bagi para tersangka.
7. Bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat mengurangi angka kasus KDRT serta dapat mencegahnya bersama-sama.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Amirudin, Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Ansori, Lutfil, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, Volume 4, Nomor 2, Desember, 2017.

Aprita, Serlika, *Hukum dan Hak Asasi Manusia,*Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.

Artikel Hukum Pidana Kemenkumham, [Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=677:penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumah-tangga&catid=101:hukum-pidana&Itemid=181&lang=en), diakses melalui laman: <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/in>dex.php?option=com\_content&view=article&id=677:penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dala m-rumah-tangga&catid=101&Itemid=181&lang=en

Asshiddiqie, Jimly, *Penegakan Hukum*, diakses melalui [http://www.jimly.com/ makalah/](http://www.jimly.com/%20makalah/)namafile/56/Penegakan\_Hukum.pdf

Astari, Jessica Adya, “Penerapan Pasal Kekerasan Psikis dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Skripsi FH UI*, 2011, hlm. 50, diakses melalui laman: https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20232967-S239-Jessica% 20Adya%20A stari.pdf

Azzahra, Noor Fatimah, “Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Fikri, Volume 2, Nomor, 1, Juni, 2017.

BBC News Indonesia, “RUU TPKS disahkan setelah berbagai penolakan selama enam tahun, apa saja poin pentingnya?”, diakses melalui laman:<https://www.bbc.com/indonesia/> indonesia- 61077691

Budiyanto, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara,* Jakarta: Erlangga, 2000.

Bugin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap perempuan Tahun 2020, hlm.19 diakses melalui laman: <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, <https://www.komnasham.go.id/files/147523> 1326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf

Dermawan, Muhammad Kemal, *Teori Kriminologi*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Penerbit Universitas Terbuka, edisi kedua, 2007.

Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2006.

Irmansyah, Rizky Ariestandi, *Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, diakses melalui laman sumber: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Krahe, Barbara, *Perilaku Agresif*, Yogyakarta : Pustaka Belajar. 2005.

Maharani, Tsarina, “Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Kompas.com*, 28 September 2021, diakses melalui laman [https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas perempuan -catat-544452-kekerasan-dalam-rumah?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas%20perempuan%20-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah?page=all).

Mamahit, Laurensius, “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia” *Jurnal Lex Privatum*, Volume I, Nomor 1, Januari-Maret, 2013.

Manan, Mohammad ‘Azzam, “Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologis”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 5, Nomor 3, September 2008.

Martha, Aroma Elmina, *Perempuan: Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.

Mohammad, Adriana Pakendek, dan Zainurrafiqi, “Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia di Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan”, *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*, Volume 3, Nomor 2, Maret, 2023.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Ngutra, Theresia, “Hukum dan Sumber-Sumber Hukum”, *Jurnal Supremasi*, Volume XI, Nomor 2, Oktober, 2016.

Pandiangan, L. Elly AM, “Perlindungan Hukum dari Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004”, *Jurnal Hukum tô-râ*, Volume 3, Nomor 2, Agustus, 2017.

Priyanto, Mamdukh Adi, “Kasus Suami yang Menganiaya Istri di Kota Tegal, Polisi Sita Pisau Dapur, Palu Hingga Kayu”, *Tribunjeteng.com*, 21 November 2017, diakses melalui laman https://jateng.tribunnews. com/2017/11/21/kasus-suami-yang-menganiaya-istri-di-kota-tegal-polisi-sita-pisau-dapur-palu-hingga-kayu

Rahardjo, Satipto, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Ridwan, “Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syir’ah*, Volume 14, Nomor 1, 2007.

Rochaethy, Nur, “Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia”, *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, Volume 7, Nomor 1, Juni, 2014.

Rosyaadah, Rifa’, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional” *Jurnal HAM*, Volume 12, Nomor 2, Agustus, 2021.

S., Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Santosa, Agung Budi, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam,* Volume 10, Nomor 1, Juni, 2019.

Sanyoto, “Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8, Nomor 3, September, 2008.

Saraswati, Rika*, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Savitri, Niken, *HAM Perempuan, Kritik Hukum Teori Feminis Terhadap KUHP*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2006.

Soeroso, Hadiati Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Sutiawati dan Nur Fadhilah Mappaselleng, “Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 4, Nomor 1, 2020.

Syarifah, Sayyidatus, "Deretan Kasus KDRT Artis Setahun Terakhir yang Bikin Geger", *hot.detik.com*, 06 Juni 2023, diakses melalui laman <https://hot.detik.com/celeb/d-6570981/deretan-kasus-kdrt-artis-setahun-terakhir-yang-bikin-geger>.

Temmanengnga, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, diakses melalui laman sumber: <https://ham.go.id/2014/05/09/kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt/>.

Tim CNN Indonesia, “Polisi Pergoki Suami Mau Buang Istri Hamil Tua ke Sungai di Makassar”, *cnnindonesia.com*, 6 April 2022, diakses melalui laman https://www.cnnindonesia. com/nasional /20220406070627-12-780869/polisi-pergoki-suami-mau-buang-istri-hamil-tua-ke-sungai-di-makassar

Tim CNN Indonesia, "Kronologi Kasus KDRT Rizky Billar ke Lesti Kejora hingga Resmi Ditahan", *cnnindonesia.com*, 06 Juni 2023, diakses melalui laman https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20221013170917-234-860223/kronologi-kasus-kdrt-rizky-billar-ke-lesti-kejora-hingga-resmi-ditahan/2.

Tutik, Titik Triwulan, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,* Jakarta: Kencana, 2010.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diakses melalui https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013\_file\_mpr.pdf

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diakses melalui laman <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf>

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diakses melalui laman: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diakses melalui <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang%24H9FVDS>. pdf.

Widyastuti, Reni, “Kekerasan dalam Rumah Tangga dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal MMH*, Jilid 40, Nomor 1, Maret, 2011.

Yanti, Vina Ainin Salfi, “Analisis Kasus KDRT Yang Dialami Ibu Karsiwen dalam Perspektif Hukum dan HAM Serta Pemenuhan dan Perlindungan atas Hak-haknya*” skripsi*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2021.

Zaidan, M. Ali, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

1. Mohammad ‘Azzam Manan, “Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologis”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 5, Nomor 3, September 2008, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-1)
2. Temmanengnga, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, diakses melalui laman sumber: https://ham.go.id/2014/05/09/kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt/ [↑](#footnote-ref-2)
3. Reni Widyastuti, “Kekerasan dalam Rumah Tangga dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal MMH*, Jilid 40, Nomor 1, Maret, 2011, hlm. 80. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sayyidatus Syarifah, "Deretan Kasus KDRT Artis Setahun Terakhir yang Bikin Geger" diakses melalui laman https://hot.detik.com/celeb/d-6570981/deretan-kasus-kdrt-artis-setahun-terakhir-yang-bikin-geger. [↑](#footnote-ref-6)
7. Tim CNN Indonesia, "Kronologi Kasus KDRT Rizky Billar ke Lesti Kejora hingga Resmi Ditahan" diakses melalui laman https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20221013170917-234-860223/kronologi-kasus-kdrt-rizky-billar-ke-lesti-kejora-hingga-resmi-ditahan/2. [↑](#footnote-ref-7)
8. Tim CNN Indonesia, “Polisi Pergoki Suami Mau Buang Istri Hamil Tua ke Sungai di Makassar”, *cnnindonesia.com*, 6 April 2022, diakses melalui laman https://www.cnnindonesia. com/nasional /20220406070627-12-780869/polisi-pergoki-suami-mau-buang-istri-hamil-tua-ke-sungai-di-makassar. [↑](#footnote-ref-8)
9. Mamdukh Adi Priyanto, “Kasus Suami yang Menganiaya Istri di Kota Tegal, Polisi Sita Pisau Dapur, Palu Hingga Kayu”, *Tribunjeteng.com*, 21 November 2017, diakses melalui laman https://jateng.tribunnews. com/2017/11/21/kasus-suami-yang-menganiaya-istri-di-kota-tegal-polisi-sita-pisau-dapur-palu-hingga-kayu. [↑](#footnote-ref-9)
10. Tsarina Maharani, “Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Kompas.com*, 28 September 2021, diakses melalui laman [https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas perempuan -catat-544452-kekerasan-dalam-rumah?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas%20perempuan%20-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah?page=all). [↑](#footnote-ref-10)
11. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, diakses melalui laman sumber: https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan [↑](#footnote-ref-11)
12. Niken Savitri, *HAM Perempuan, Kritik Hukum Teori Feminis Terhadap KUHP*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-12)
13. Reni Widyastuti, *op.cit.*, hlm. 81. [↑](#footnote-ref-13)
14. Satipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm.1-2. [↑](#footnote-ref-14)
15. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diakses melalui laman https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf [↑](#footnote-ref-15)
16. Rika Saraswati*, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-16)
17. Reni Widyastuti, *op.cit.*, hlm. 83. [↑](#footnote-ref-17)
18. Vina Ainin Salfi Yanti, “Analisis Kasus KDRT Yang Dialami Ibu Karsiwen dalam Perspektif Hukum dan HAM Serta Pemenuhan dan Perlindungan atas Hak-haknya*” skripsi*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2021. [↑](#footnote-ref-18)
19. Rifa’ Rosyaadah, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional” *Jurnal HAM*, Volume 12, Nomor 2, Agustus, 2021. [↑](#footnote-ref-19)
20. Noor Fatimah Azzahra, “Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Fikri*, Volume 2, Nomor, 1, Juni, 2017. hlm. 260-279. [↑](#footnote-ref-20)
21. Nur Rochaethy, “Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia”, *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, Volume 7, Nomor 1, Juni, 2014. [↑](#footnote-ref-21)
22. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 107. [↑](#footnote-ref-22)
23. Zainal Askin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 118. [↑](#footnote-ref-23)
24. Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu

    Media Publishing, 2006, hlm. 299. [↑](#footnote-ref-24)
25. Theresia Ngutra, “Hukum dan Sumber-Sumber Hukum”, *Jurnal Supremasi*, Volume XI, Nomor 2, Oktober, 2016, hlm. 210. [↑](#footnote-ref-25)
26. Jhonny Ibrahim, *op.cit*., hlm. 300. [↑](#footnote-ref-26)
27. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005, hlm. 88. [↑](#footnote-ref-27)
28. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*,

    Jakarta: Rajawali Pres, 2006, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-28)
29. Jhonny Ibrahim, *op.cit*., hlm. 296. [↑](#footnote-ref-29)
30. Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 174. [↑](#footnote-ref-30)
31. Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 203. [↑](#footnote-ref-31)
32. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-32)
33. Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan: Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 30. [↑](#footnote-ref-33)
34. Noor Fatimah Azzahra, *op.cit*., hlm. 263 [↑](#footnote-ref-34)
35. Ridwan, “Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Syir’ah*, Volume 14, Nomor 1, 2007, hlm. 162 [↑](#footnote-ref-35)
36. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diakses melalui laman https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf [↑](#footnote-ref-36)
37. Hadiati Moerti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 80-82. [↑](#footnote-ref-37)
38. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *op.cit.* [↑](#footnote-ref-38)
39. Noor Fatimah Azzahra, *op.cit*., hlm. 269-271. [↑](#footnote-ref-39)
40. Barbara Krahe, *Perilaku Agresif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005, hlm. 292-293. [↑](#footnote-ref-40)
41. Hadiati Moerti Soeroso, *op.cit.*, hlm. 77-80. [↑](#footnote-ref-41)
42. Budiyanto, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara,* Jakarta: Erlangga, 2000, hlm. 56. [↑](#footnote-ref-42)
43. Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,* Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 281. [↑](#footnote-ref-43)
44. Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 61. [↑](#footnote-ref-44)
45. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diakses melalui <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang%24H9FVDS>. pdf. [↑](#footnote-ref-45)
46. Serlika Aprita, *Hukum dan Hak Asasi Manusia,*Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020, hlm. 72. [↑](#footnote-ref-46)
47. Ibid., hlm 73. [↑](#footnote-ref-47)
48. Ibid., hlm. 74 [↑](#footnote-ref-48)
49. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *Op.cit*. [↑](#footnote-ref-49)
50. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-50)
51. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, diakses melalui https://www.komnasham .go.id/files/147523 1326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf [↑](#footnote-ref-51)
52. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diakses melalui diakses melalui laman: https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013\_file\_mpr.pdf [↑](#footnote-ref-52)
53. Satjipto Raharjo*, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-53)
54. Sanyoto, “Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8, Nomor 3, September, 2008, hlm. 200. [↑](#footnote-ref-54)
55. M. Ali Zaidan*, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakrta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 110. [↑](#footnote-ref-55)
56. Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, hlm. 1, diakses melalui [http://www.jimly.com/ makalah/](http://www.jimly.com/%20makalah/)namafile/56/Penegakan\_Hukum.pdf [↑](#footnote-ref-56)
57. Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 12-13. [↑](#footnote-ref-57)
58. Satjipto Raharjo, *op.cit*., hlm. 32. [↑](#footnote-ref-58)
59. Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, Volume 4, Nomor 2, Desember, 2017, hlm. 153. [↑](#footnote-ref-59)
60. Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 121. [↑](#footnote-ref-60)
61. Agung Budi Santosa, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat islam,* Volume 10, Nomor 1, Juni, 2019, hlm. 54. [↑](#footnote-ref-61)
62. Mohammad, Adriana Pakendek, dan Zainurrafiqi, “Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia di Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan”, *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*, Volume 3, Nomor 2, Maret, 2023, hlm. 695. [↑](#footnote-ref-62)
63. Agung Budi Santosa, *op.cit*., hlm. 55. [↑](#footnote-ref-63)
64. Sutiawati dan Nur Fadhilah Mappaselleng, “Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 4, Nomor 1, 2020, hlm. 25 [↑](#footnote-ref-64)
65. L Elly AM Pandiangan, “Perlindungan Hukum dari Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004”, *Jurnal Hukum tô-râ*, Volume 3, Nomor 2, Agustus, 2017. [↑](#footnote-ref-65)
66. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *op.cit.* [↑](#footnote-ref-66)
67. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, *op.cit*. [↑](#footnote-ref-67)
68. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-68)
69. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *op.cit*., hlm. 66, [↑](#footnote-ref-69)
70. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *op.cit*. [↑](#footnote-ref-70)
71. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *op.cit.* [↑](#footnote-ref-71)
72. L Elly AM Pandiangan*, op.cit*. [↑](#footnote-ref-72)
73. Jessica Adya Astari, “Penerapan Pasal Kekerasan Psikis dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Skripsi FH UI*, 2011, hlm. 50, diakses melalui laman: https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20232967-S239-Jessica% 20Adya%20A stari.pdf [↑](#footnote-ref-73)
74. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *op.cit*. hlm. 68. [↑](#footnote-ref-74)
75. *Ibid.* hlm. 70. [↑](#footnote-ref-75)
76. Jessica Adya Astari, *op.cit*., hlm. 64. [↑](#footnote-ref-76)
77. Sutiawati dan Nur Fadhilah Mappaselleng, *op.cit*. [↑](#footnote-ref-77)
78. BBC News Indonesia, “RUU TPKS disahkan setelah berbagai penolakan selama enam tahun, apa saja poin pentingnya?”, diakses melalui laman:<https://www.bbc.com/indonesia/> indonesia- 61077691 [↑](#footnote-ref-78)
79. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diakses melalui laman: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022 [↑](#footnote-ref-79)
80. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-80)
81. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *op.cit*. hlm. 68-69. [↑](#footnote-ref-81)
82. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, *op.cit*. [↑](#footnote-ref-82)
83. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *Op.cit* [↑](#footnote-ref-83)
84. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-84)
85. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-85)
86. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *op.cit*. [↑](#footnote-ref-86)
87. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *op.cit*. hlm. 66-67. [↑](#footnote-ref-87)
88. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *op.cit*. [↑](#footnote-ref-88)
89. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, *op.cit*. [↑](#footnote-ref-89)
90. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *op.cit*. [↑](#footnote-ref-90)
91. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-91)
92. Ridwan, *op.cit*., hlm. 163. [↑](#footnote-ref-92)
93. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *op.cit.* [↑](#footnote-ref-93)
94. CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap perempuan Tahun 2020, hlm.19 diakses melalui laman: https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf [↑](#footnote-ref-94)
95. *Ibid.* hlm. 21. [↑](#footnote-ref-95)
96. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-96)
97. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *op.cit*. [↑](#footnote-ref-97)
98. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-98)
99. Artikel Hukum Pidana Kemenkumham, [Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=677:penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumah-tangga&catid=101:hukum-pidana&Itemid=181&lang=en), diakses melalui laman: <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/in> dex.php?option=com\_content&view=article&id=677:penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dala m-rumah-tangga&catid=101&Itemid=181&lang=en [↑](#footnote-ref-99)
100. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-100)
101. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-101)
102. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *op.cit*. [↑](#footnote-ref-102)